

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, H. (2020). Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (Studi Pada 3 Skpd Di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 6(1).
- Andriani, D. R. (2017). Evaluasi Sistem Pencatatan Akuntansi Sppd Pada Pt. Pln (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur Dan Bali App Surabaya (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Aprianingsih, R. A. A. (2018). Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Spj Belanja Bidang Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Cilacapkab. Sejarah Kabupaten Cilacap. [Kabupaten Cilacap | Website Resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap \(cilacapkab.go.id\)](http://Kabupaten Cilacap | Website Resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap (cilacapkab.go.id)) diakses pada 30 Juni 2021
- Hakim, I. L., & Fitriani, L. (2016). Perancangan Sistem Informasi Laporan Surat Pertanggungjawaban Belanja Operasional Di Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuwangi. *Jurnal Algoritma*, 13(2), 239-245.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](http://Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id)) diakses pada 20 Juni 2021
- Khusaini, Mohammad. 2018. *Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Bupati Cilacap No. 61 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Bupati Cilacap No. 84 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap No. 111 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
- Permana, I. (2014). Proses Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (Spj) Keuangan Kegiatan Bulan Desember Tahun Anggaran 2013 Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Garut (Doctoral dissertation).
- Pratama, N. A., & Hermawan, C. (2016). Aplikasi Pembelajaran Tes Potensi Akademik Berbasis Android. *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 6(1).

- Pratama, R. H. (2018). Analisis Sistem Informasi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. *Substansi*, 2(1), 77-96.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202-224.
- Purnamayudhia, O., & Satoto, E. B. (2014). Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Apotek. *Jurnal Teknik Industri*, 4(3).
- RAHMAN, M. F. F. 2018. Prosedur Administrasi Pencairan Dana Perjalanan Dinas Pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan. Jember.
- Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022.
- Rindrarti, M. M. (2014). Proses Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Doctoral dissertation).
- ROSE, R. S. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 138-150.
- Sapitri, S. (2018). Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Zahroh, F. Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.